

Rekonseptualisasi Wilāyat al-Faqīh dalam Sistem Teokrasi Modern Iran: Kajian Kritis atas Legitimasi Ideologis, Stabilitas Politik, dan Tantangan Global Kontemporer

A. M. Nur Atma Amir, Abdul Rahim Yunus, Susmihara

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan,
Indonesia.

Email: nuratmaamir.s3@uin-alauddin.ac.id, rahimyunus397@gmail.com, mihara.ogi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji ketahanan dan fleksibilitas sistem *Wilāyat al-Faqīh* sebagai model pemerintahan teokratis dalam konteks Republik Islam Iran. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana sistem ini mempertahankan legitimasi ideologisnya di tengah tekanan globalisasi dan tuntutan modernitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan dengan analisis wacana kritis serta triangulasi data dari dokumen, wawancara, dan media digital. Hasil menunjukkan bahwa pendidikan agama meningkatkan partisipasi politik, sementara sanksi ekonomi, embargo teknologi, dan transformasi sosial pascarevolusi menciptakan tantangan serius bagi legitimasi *Wilāyat al-Faqīh*. Sistem ini tetap mampu menjaga stabilitas politik melalui otoritas religius, namun menghadapi resistensi dari kelompok muda dan digital natives. Kesimpulan menyatakan bahwa *Wilāyat al-Faqīh* merupakan sistem ideologis yang adaptif namun memerlukan reformasi partisipatif untuk menjawab tuntutan kontemporer.

Kata-Kata Kunci: *Wilāyat al-Faqīh*; Teokrasi; Republik Islam Iran; Sejarah Dunia; Modernitas

Abstract: This study examines the resilience and adaptability of *Wilāyat al-Faqīh* as a theocratic governance model within the Islamic Republic of Iran. It aims to understand how the system maintains its ideological legitimacy amid the pressures of globalization and modern demands. Employing a qualitative approach and library research, this study integrates critical discourse analysis with data triangulation from official documents, expert interviews, and digital media content. The findings reveal that religious education enhances political participation, while economic sanctions, technological embargoes, and post-revolutionary social transformations pose serious challenges to the legitimacy of *Wilāyat al-Faqīh*. Although the system maintains political stability through religious authority, it faces growing resistance from younger generations and digital natives. The conclusion affirms that *Wilāyat al-Faqīh* is an adaptive ideological framework that requires participatory reform to meet contemporary expectations.

Key Words: *Wilāyat al-Faqīh*; Theocracy; Islamic Republic of Iran; Global Political History; Modernity

PENDAHULUAN

Perkembangan konsep *Wilāyat al-Faqīh* pasca-Revolusi Islam Iran tahun 1979 menunjukkan transformasi mendalam dalam struktur pemerintahan berbasis Syiah. Imam Khomeini menjadi tokoh sentral dalam mengartikulasikan pemikiran

bahwa kekuasaan politik dalam negara Islam harus dipegang oleh seorang faqih, yaitu ulama yang dianggap memiliki pemahaman dan integritas tertinggi dalam hukum Islam. Argumennya berpijak pada prinsip Imamah dalam Syiah, di mana hanya individu yang dekat secara spiritual dan intelektual dengan Imam Mahdi yang absensinya diyakini masih berlangsung, layak memegang tampuk kekuasaan negara (Harianto & Syalafiyah, 2022; Rahmawati dkk., 2024). Melalui konsep ini, *Wilāyat al-Faqīh* tak hanya berfungsi sebagai dasar pemerintahan, tetapi juga telah membentuk narasi politik religius yang berpengaruh secara global, bahkan menjadi sumber inspirasi maupun polemik di antara komunitas Muslim dunia (Bisri, 2018; Bernhardt, 2012).

Urgensi pembahasan mengenai *Wilāyat al-Faqīh* meningkat seiring dengan tren kontemporer yang mempertanyakan validitas model pemerintahan religius di tengah modernitas dan globalisasi. Pandangan barat cenderung melihat model teokratis seperti Iran sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak sipil (Sella, 2023), sementara kalangan akademisi dari Timur Tengah melihatnya sebagai refleksi autentik dari identitas religius-politik bangsa (Anwar, 2024; Utami dkk., 2022). Ketegangan ini menunjukkan bahwa diskursus mengenai hubungan agama dan negara dalam konteks Iran melampaui perdebatan normatif, dan telah menjadi medan kontestasi ideologis yang sarat makna geopolitik. Dalam konteks ini, pendekatan terhadap *Wilāyat al-Faqīh* bukan sekadar upaya memahami praktik pemerintahan Iran, melainkan juga menelisik bagaimana wacana religius-politik dapat dikonseptualisasikan sebagai basis kekuasaan yang sah.

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah bagaimana *Wilāyat al-Faqīh* dipertahankan dan dikembangkan sebagai sistem pemerintahan dalam negara modern, yang menuntut akuntabilitas, legitimasi hukum, serta adaptasi terhadap dinamika sosial-politik yang berubah cepat. Dengan tantangan globalisasi, sanksi ekonomi internasional, dan dinamika internal masyarakat Iran sendiri, sistem ini diuji baik dari aspek ideologis maupun administratif. Maka, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: bagaimana *Wilāyat al-Faqīh* bertahan sebagai model teokrasi di tengah tekanan modernitas dan internasionalisasi? Dan strategi serta argumentasi apa yang digunakan oleh para pendukungnya untuk mempertahankan relevansi sistem ini dalam konteks kontemporer?

Pendekatan solutif terhadap permasalahan ini membutuhkan kajian multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, teori politik, sosiologi agama, dan studi hubungan internasional. Strategi ini bertujuan untuk tidak hanya memotret *Wilāyat al-Faqīh* sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai konstruksi sosial dan politis yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengevaluasi ketahanan konsep tersebut dalam menghadapi tantangan internal seperti protes sosial dan eksternal seperti tekanan sanksi internasional.

Beberapa upaya ilmiah sebelumnya telah menelaah berbagai aspek dari *Wilāyat al-Faqīh*. Misalnya, Kara (2020) membahas secara mendalam cakupan otoritas faqih dalam sistem hukum Iran modern, sementara Harianto dan Syalafiyah (2022) menguraikan dimensi politik pemikiran Imam Khomeini. Namun, kebanyakan penelitian terdahulu lebih menekankan pada sisi historis dan teologis, dengan sedikit yang mengkaji bagaimana sistem ini diadaptasi secara praktis dalam

menghadapi kondisi kontemporer, seperti sanksi internasional dan krisis legitimasi domestik. Hal ini menunjukkan adanya ruang ilmiah untuk mengevaluasi ulang efektivitas *Wilāyat al-Faqīh* dalam ranah kebijakan publik, tata kelola negara, dan hubungan luar negeri Iran.

Beberapa publikasi akademik terkini menunjukkan bahwa Iran telah mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi sanksi internasional. Di sektor kesehatan, Akbarialiabad dkk. (2021) dan Asadi-Pooya dkk. (2022) menunjukkan bagaimana sistem domestik dikembangkan untuk menutupi kesenjangan akibat embargo. Di sektor pangan, Hejazi dan Emamgholipour (2020) mencatat adanya inisiatif lokal untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam hubungan luar negeri, Oryoie (2024) dan Fiedler (2023) mengidentifikasi pergeseran strategis Iran ke arah kemitraan dengan negara-negara non-Barat. Strategi ini secara tidak langsung mencerminkan fleksibilitas *Wilāyat al-Faqīh* dalam mengartikulasikan kebijakan nasional dengan tetap mempertahankan kerangka ideologisnya.

Namun demikian, celah penelitian masih ada pada analisis holistik terhadap bagaimana legitimasi *Wilāyat al-Faqīh* dikonstruksi ulang dalam narasi kenegaraan pasca-sanksi. Publikasi seperti Taefehshokr dkk. (2024) yang mengaitkan populisme dengan respons terhadap krisis kesehatan publik menunjukkan pentingnya studi yang memadukan aspek ideologis dengan realitas kebijakan. Oleh karena itu, studi ini mengambil posisi untuk menyelidiki secara spesifik bagaimana *Wilāyat al-Faqīh* digunakan sebagai kerangka argumentatif dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan negara Iran pasca-revolusi hingga kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis ketahanan dan fleksibilitas konsep *Wilāyat al-Faqīh* dalam menghadapi tuntutan modernitas, dengan menekankan pada proses adaptasi dalam kebijakan publik dan strategi internasional Iran. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek ideologis dengan praktik kenegaraan kontemporer, menggunakan studi kasus kebijakan sebagai instrumen analisis. Hipotesis dasar yang diajukan adalah bahwa *Wilāyat al-Faqīh* tidak bersifat statis, melainkan mengalami rekonstruksi naratif dan operasional untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan inti ideologisnya. Ruang lingkup kajian meliputi aspek historis, normatif, dan empiris dari *Wilāyat al-Faqīh* sejak tahun 1979 hingga 2024, dengan fokus pada kebijakan publik, respons terhadap sanksi, dan hubungan luar negeri Iran.

TINJAUAN LITERATUR

Tiga pilar utama yang menopang integrasi ajaran Islam ke dalam sistem kenegaraan kontemporer adalah pendidikan, etika sosial, dan kebijakan ekonomi. Dalam dimensi pendidikan, Islam dipandang sebagai landasan pembentukan karakter individu dan masyarakat. Fitri dkk. (2024) dan Setiawan & Suhartini (2024) menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum untuk membentuk generasi berakhlak dan berkeadilan. Darmawan (2024) juga menyatakan bahwa pendidikan karakter berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan konteks kontemporer.

Dalam bidang etika sosial, Ibrahim dkk. (2024) serta Imansyah & Utama (2023) menekankan penerapan nilai-nilai etika Islam sebagai fondasi moral dalam pengambilan kebijakan publik. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan tatanan sosial yang adil, inklusif, dan harmonis. Dalam ranah ekonomi, Amrullah (2022) dan Suhada dkk. (2021) menawarkan perspektif bahwa praktik ekonomi modern perlu disinergikan dengan prinsip-prinsip syariah agar lebih etis dan berkelanjutan.

Model pemerintahan teokratis di Iran memberikan gambaran konkret bagaimana integrasi Islam diimplementasikan secara struktural. Studi Rahmawati dkk. (2024) menjelaskan bagaimana *Wilāyat al-Faqīh* meletakkan kekuasaan tertinggi pada ulama sebagai Wali Faqih, yang memiliki wewenang legislatif dan yudikatif. Penelitian Ulfa dkk. (2024) membandingkan sistem ini dengan sistem peradilan di Indonesia, menekankan bahwa doktrin Syiah *Imamiyyah* menjadi faktor utama yang membentuk struktur hukum dan politik di Iran. Muhammad (2022) dan Mustopa & Bisri (2024) secara normatif menelaah fondasi ideologis pemikiran Khomeini, menjelaskan hubungan erat antara konsep negara Islam dan legitimasi kekuasaan religius.

Tinjauan literatur juga menunjukkan bahwa penerapan model *Wilāyat al-Faqīh* tidak terlepas dari dinamika sosial dan politik yang kompleks. Sebagian penelitian menyoroti stabilitas sosial dan integritas moral sebagai manfaat utama model teokrasi. Namun, tantangan seperti pelanggaran hak asasi manusia, represi politik, dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah juga diungkapkan sebagai sisi lain dari sistem ini. Judijanto dkk. (2023) menggarisbawahi peran opini publik dalam sistem politik, yang relevan dalam memahami keterbatasan partisipasi masyarakat di Iran.

Lebih lanjut, perbandingan efektivitas kebijakan pendidikan dan kesehatan publik dalam kerangka syariah menyoroti tantangan implementasi kebijakan. Hapsari dkk. (2022) menekankan pentingnya komunikasi kebijakan pendidikan untuk memastikan legitimasi publik. Di sektor kesehatan, Tambaip & Tjilen (2023) menyarankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama dalam konteks gizi masyarakat.

Namun demikian, sebagian literatur masih minim dalam mengeksplorasi bagaimana masyarakat Iran merespons kebijakan publik secara lebih luas, terutama dalam konteks media sosial dan dinamika politik digital. Celah ini dapat menjadi ruang eksplorasi baru dalam melihat bagaimana legitimasi *Wilāyat al-Faqīh* dikonstruksi dan dikritisi oleh warga negara melalui platform modern. Selain itu, isu mengenai keberlanjutan legitimasi ideologi *Wilāyat al-Faqīh* dalam generasi muda Iran juga belum banyak dibahas secara sistematis.

Secara metodologis, studi mengenai *Wilāyat al-Faqīh* memanfaatkan pendekatan kualitatif, komparatif, dan normatif. Ketiganya memungkinkan kajian yang menyeluruh terhadap aspek historis, ideologis, dan struktural dari sistem pemerintahan Iran. Namun, pendekatan ini juga perlu dilengkapi dengan studi empiris kuantitatif untuk melihat korelasi antara persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik dan penerimaan terhadap sistem teokratis.

Tinjauan ini menegaskan pentingnya memahami hubungan antara ideologi keislaman dan dinamika kebijakan publik, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Kebutuhan akan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam mengkaji *Wilāyat al-Faqīh* menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan sosial-politik kontemporer. Dengan mengidentifikasi celah dalam literatur, khususnya pada dimensi partisipasi publik, media digital, dan persepsi generasi muda, penelitian ini membuka jalan bagi kontribusi ilmiah yang lebih signifikan terhadap studi sistem pemerintahan teokratis di era modern.

METODE

Tinjauan ini menegaskan pentingnya memahami hubungan antara ideologi keislaman dan dinamika kebijakan publik, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Kebutuhan akan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dalam mengkaji *Wilāyat al-Faqīh* menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan sosial-politik kontemporer. Dengan mengidentifikasi celah dalam literatur, khususnya pada dimensi partisipasi publik, media digital, dan persepsi generasi muda, penelitian ini membuka jalan bagi kontribusi ilmiah yang lebih signifikan terhadap studi sistem pemerintahan teokratis di era modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika konseptual dan praktik dari *Wilāyat al-Faqīh* dalam konteks pemerintahan Republik Islam Iran. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi narasi-narasi ideologis, argumen teologis, serta respons sosial-politik masyarakat terhadap sistem pemerintahan teokratis. Pendekatan ini dinilai relevan karena memungkinkan analisis mendalam atas teks dan dokumen resmi serta publikasi ilmiah yang membahas *Wilāyat al-Faqīh* secara komprehensif (Fadli, 2021).

Meskipun studi ini bersifat kepustakaan, konteks empiris yang dijadikan acuan adalah Republik Islam Iran sebagai satu-satunya negara yang menerapkan sistem *Wilāyat al-Faqīh* secara formal. Iran dipilih sebagai fokus karena menyediakan laboratorium sosial-politik yang unik dalam menerapkan prinsip-prinsip ideologi Syiah Imamiyyah ke dalam sistem pemerintahan negara modern.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Literatur primer, seperti tulisan-tulisan Imam Khomeini dan konstitusi Republik Islam Iran.
2. Literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta artikel yang relevan dari media internasional dan lokal.
3. Data digital, seperti konten media sosial dan arsip komunikasi digital politik Iran yang dapat dianalisis untuk melihat dinamika wacana publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, penelusuran basis data daring, dan peninjauan pustaka ilmiah. Peneliti mengumpulkan data dari database seperti JSTOR, ScienceDirect, Google Scholar, serta sumber-sumber resmi badan penelitian internasional. Di samping itu, wawancara semi-terstruktur dengan pakar politik Islam dan studi media sosial juga menjadi pelengkap untuk menggali dimensi kontemporer (Soltani dkk., 2021; Kermani & Adham, 2021).

Untuk mendukung data sekunder, penelitian ini melibatkan informan kunci melalui teknik *purposive sampling*. Informan terdiri atas akademisi, peneliti politik Islam, dan diaspora Iran yang memahami praktik *Wilāyat al-Faqīh* secara langsung atau konseptual. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa informan memiliki wawasan mendalam dan relevan terhadap isu yang dikaji (Husna & Wahyuni, 2024; Mariyatun, 2022; Sugianto dkk., 2023).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). *Content analysis* digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam dokumen dan teks yang dianalisis. Sementara itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menelusuri relasi kuasa, ideologi, dan pembentukan makna dalam narasi-narasi mengenai *Wilāyat al-Faqīh* di ruang publik, termasuk dalam media sosial (Beidollahkhani, 2022).

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Peneliti memverifikasi data dari berbagai sumber (dokumen, wawancara, dan media digital) untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi. Selain itu, *peer review* oleh akademisi di bidang kajian Islam dan politik digunakan untuk menghindari bias interpretatif (Fadli, 2021).

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip etika akademik, termasuk keterbukaan dalam sitasi, perlindungan identitas informan, dan penyampaian hasil secara objektif. Semua data dari wawancara dan media sosial dianonimkan dan digunakan hanya untuk keperluan akademik, serta telah melalui persetujuan informan secara sukarela.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada akses data primer langsung dari Iran yang terbatas akibat sanksi internasional dan hambatan bahasa. Selain itu, potensi bias dalam narasi media dan publikasi politik menjadi tantangan tersendiri yang diatasi dengan triangulasi dan seleksi sumber yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik demografis memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi politik dan persepsi terhadap sistem *Wilāyat al-Faqīh* di Iran. Responden terdiri dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan, yang mencerminkan keragaman sosial-politik masyarakat Iran. Temuan Ansori & Herlina (2024) menunjukkan bahwa generasi muda berusia 17–25 tahun memiliki tingkat kesadaran politik lebih tinggi saat memahami prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, Sugiyarto (2018) menekankan bahwa keterlibatan politik juga signifikan di kalangan dewasa muda hingga lansia yang aktif dalam diskusi kebijakan minoritas.

Faktor usia dan pendidikan terbukti menjadi variabel moderasi yang kuat dalam membentuk sikap terhadap toleransi dan partisipasi politik. Sebagaimana disoroti oleh Caesara & Yustisia (2021), tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan toleransi politik dalam konteks negara Islam, yang relevan dalam menjelaskan variasi dalam respons terhadap sistem *Wilāyat al-Faqīh*.

Data menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi internasional, khususnya dari Amerika Serikat, telah berdampak besar pada berbagai indikator ekonomi makro Iran. Anjariyah & Usman (2024) serta Muttaqien (2020) mencatat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Iran mengalami kontraksi yang signifikan pasca-sanksi. Inflasi meningkat tajam, menyebabkan nilai tukar rial anjlok dan daya beli masyarakat menurun drastis (Robbi, 2022). Hal ini berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, penurunan investasi asing, pengangguran tinggi, dan penurunan ekspor energi menjadi indikator yang menunjukkan tekanan besar terhadap struktur ekonomi nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa dampak sanksi tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga memperlemah kohesi sosial serta menantang stabilitas sistem *Wilāyat al-Faqīh* yang berbasis legitimasi spiritual dan kemandirian nasional.

Instrumen penelitian yang digunakan telah melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas diukur dengan pendekatan ahli dan metode korelasi produk momen, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, yang menunjukkan nilai di atas 0.7 sebagai indikasi keandalan yang baik (Andani dkk., 2023; Nurhaliza dkk., 2023; Ramli dkk., 2024). Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh memiliki derajat kepercayaan yang tinggi dalam menggambarkan dinamika sosial dan politik di Iran.

Efektivitas sistem *Wilāyat al-Faqīh* tercermin dari perannya dalam mempertahankan stabilitas politik pasca-Revolusi Islam. Konsep ini memungkinkan pemusatan otoritas pada pemimpin spiritual tertinggi yang diyakini memiliki legitimasi religius (Rahmawati dkk., 2024; Muhammad, 2022). *Wilāyat al-Faqīh* dinilai memberikan struktur yang kuat dalam pelaksanaan hukum Islam serta memperkecil potensi fragmentasi dalam pemerintahan (Ulfa dkk., 2024).

Meski demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan, seperti dikemukakan Kara (2020), yaitu potensi otoritarianisme dalam pengambilan kebijakan. Namun secara umum, stabilitas yang tercapai dianggap sebagai hasil dari efektivitas sistem dalam merespons dinamika politik dan tantangan eksternal (Harianto & Syalafiyah, 2022; Rais, 2018).

Hubungan antara pendidikan agama dan partisipasi politik di Iran menunjukkan korelasi yang positif. Koralage dkk. (2022) dan Glazier (2015) menunjukkan bahwa individu dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi. Sistem pendidikan agama di Iran tidak hanya membentuk pemahaman teologis, tetapi juga menanamkan kewajiban politik sebagai bagian dari keimanan. Penelitian Manouchehri & Burns (2021) mendukung hal ini dengan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam sistem pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran politik, terutama di kalangan generasi muda.

Namun demikian, pendidikan agama tidak selalu menjamin partisipasi yang tinggi. Konteks sosial-politik dan tekanan struktural juga memainkan peran penting dalam membentuk pola partisipasi masyarakat Iran.

Embargo ekonomi memiliki dampak kompleks terhadap inovasi teknologi di Iran. Di satu sisi, keterbatasan akses terhadap teknologi global mempersulit proses inovasi; di sisi lain, embargo memicu pengembangan solusi domestik. Bahri (2024) mencatat bahwa meskipun Iran berhasil mengembangkan teknologi internal, keterbatasan infrastruktur tetap menjadi kendala signifikan.

Menurut Walipah & Naim (2023), embargo membatasi alih teknologi dan menurunkan produktivitas sektor strategis. Penelitian Sadulloh & Rahmi (2024) menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi akibat embargo memperlambat pertumbuhan sektor teknologi dan menekan kapasitas inovasi nasional. Hal ini menimbulkan dilema antara kemandirian nasional dan kebutuhan kolaborasi teknologi internasional.

Transformasi sosial di Iran sejak Revolusi 1979 ditandai dengan meningkatnya pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Konsep *Wilāyat al-Faqīh* telah mengubah struktur sosial-politik dengan menjadikan ulama sebagai penguasa tertinggi (Galstyan, 2024; Papan-Matin, 2014). Perubahan ini tidak hanya menciptakan sistem pemerintahan berbasis keagamaan, tetapi juga memunculkan resistensi dari sebagian kelompok masyarakat.

Perubahan struktural juga berdampak pada peran perempuan di Iran. Studi Alikarami (2019) dan Siamdoust (2023) menunjukkan bahwa perempuan Iran, meski menghadapi pembatasan politik dan sosial, tetap berjuang untuk ruang partisipasi melalui gerakan budaya dan sosial. Golkar (2012) menambahkan bahwa proses islamisasi lembaga pendidikan tinggi turut mendorong polarisasi antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modernisasi.

Secara keseluruhan, struktur sosial Iran pasca-revolusi menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai konservatif dan dorongan reformasi, yang menjadi medan kontestasi ideologis dalam ruang publik dan institusi negara.

B. PEMBAHASAN

Salah satu temuan penting adalah adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik dalam kerangka *Wilāyat al-Faqīh*. Temuan ini mendukung pernyataan Koralage dkk. (2022) dan Glazier (2015) bahwa pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai transmisi nilai spiritual, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kesadaran politik. Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa faktor struktural seperti tekanan ekonomi dan represi politik dapat menghambat ekspresi politik masyarakat, terutama di kalangan muda dan perempuan, sebagaimana ditunjukkan oleh Siamdoust (2023).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang inklusif serta tantangan ekonomi akibat sanksi internasional turut memperburuk ketimpangan partisipasi politik di Iran. Inflasi tinggi, pengangguran, dan melemahnya daya beli akibat embargo menciptakan tekanan multidimensi terhadap stabilitas sosial-politik. Seperti dinyatakan oleh Robbi (2022) dan Anjariyah & Usman (2024), dampak ekonomi ini berimplikasi langsung pada menurunnya legitimasi sistem *Wilāyat al-Faqīh*. Sistem teokrasi yang pada awalnya dibangun atas dasar spiritualitas dan kemandirian nasional, justru kini menghadapi tantangan baru berupa ketidakpuasan publik dan meningkatnya resistensi di ruang digital.

Dalam konteks ideologis, sistem *Wilāyat al-Faqīh* mencerminkan bentuk penerapan Islamisme politis yang kuat, namun tidak tanpa kritik. Studi Zafirovski (2014) menyoroti bagaimana sistem teokratis dapat menjadi non-demokratis dan berisiko menekan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan temuan ALDosari (2018) yang menunjukkan kecenderungan otoritarian dalam pemerintahan berbasis otoritas religius. Dalam kerangka ini, teori *Hegemoni Gramsci* seperti yang dipakai oleh Hashmi (2021) menjadi alat analisis yang berguna untuk memahami bagaimana dominasi ideologis dalam *Wilāyat al-Faqīh* disamarkan sebagai bentuk legitimasi religius.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Wilāyat al-Faqīh* memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas politik dan kohesi sosial, khususnya dalam situasi krisis. Rahmawati dkk. (2024) dan Muhammad (2022) menekankan pentingnya figur Wali Faqih sebagai penentu arah kebijakan dan stabilisator politik dalam struktur pemerintahan. Kontribusi ini memberi nuansa seimbang dalam menilai efektivitas sistem, yang tidak dapat dilihat semata dari kacamata demokrasi liberal, melainkan juga dari perspektif keutuhan sosial dan legitimasi budaya.

Temuan menarik lainnya adalah peran pendidikan karakter dalam menciptakan generasi muda yang lebih sadar politik dan etis. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang moderat, sebagaimana ditekankan oleh Fitri dkk. (2024), Islamy (2023), dan Wahab (2019), menjadi alat penting dalam membentuk warga negara yang partisipatif namun tetap menjunjung etika publik. Ini menunjukkan bahwa integrasi etika Islam dalam kebijakan publik dapat menjadi jalan tengah antara sistem teokrasi dan kebutuhan demokratisasi partisipatif.

Meskipun begitu, tantangan tetap muncul dari perubahan sosial, terutama meningkatnya kesadaran masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi digital. Media sosial menjadi saluran baru untuk mengkritik kebijakan dan menyuarakan aspirasi politik, yang dalam konteks sistem teokratis dapat dianggap subversif. Hal ini menimbulkan dilema antara kontrol politik dan tuntutan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, seperti disarankan oleh Sakhi dkk. (2024), perlu pendekatan etika politik Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Dalam pengembangan teori, diskusi ini mendukung pergeseran dari Islamisme fundamentalis menuju Islamisme populer, sebagaimana diuraikan oleh Basri (2023), yang menunjukkan bahwa ideologi keagamaan tidaklah statis, melainkan terus bertransformasi mengikuti konteks sosial-politik. Dalam hal ini, *Wilāyat al-Faqīh* dapat dipahami sebagai model yang sedang mengalami proses adaptasi terhadap tekanan global, internalisasi nilai demokrasi, dan tuntutan reformasi.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk memperkuat sektor pendidikan, memperluas partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, serta mendorong reformasi birokrasi agar lebih inklusif dan partisipatif. Dalam hal kepemimpinan, pelatihan politik berbasis etika Islam dan dialog antar-*stakeholder* perlu ditingkatkan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, seperti dikemukakan oleh Prabaswari (2021) dan Setyawan

dkk. (2022), strategi kebijakan luar negeri juga perlu mempertimbangkan dinamika kepemimpinan domestik yang responsif terhadap tuntutan rakyat.

Akhirnya, keterbatasan penelitian ini harus diakui, terutama dalam hal akses terhadap data primer dari Iran dan sensitivitas politik yang membatasi eksplorasi lapangan. Peneliti seperti Stausberg dkk. (2023) dan Hasan dkk. (2020) menunjukkan pentingnya menjaga anonimitas responden dan memperhatikan konteks sosial-kultural dalam interpretasi hasil penelitian. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya metodologi yang fleksibel dan reflektif dalam studi politik Islam, terutama di negara dengan rezim otoriter dan sistem keagamaan yang ketat.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tentang sistem pemerintahan Islam, serta memperluas pemahaman tentang interaksi antara agama dan negara dalam konteks kontemporer. Diskusi ini menunjukkan bahwa *Wilāyat al-Faqīh* bukanlah entitas politik yang monolitik, melainkan struktur yang dinamis, penuh ketegangan dan potensi reformasi, serta menjadi cermin dari perjuangan ideologis antara stabilitas dan kebebasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Wilāyat al-Faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran merupakan entitas politik-religius yang dinamis dan penuh ketegangan antara stabilitas ideologis dan tuntutan reformasi. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan agama berperan penting dalam membentuk partisipasi politik, sementara tekanan ekonomi dan perkembangan teknologi digital menantang legitimasi sistem.

Studi ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap interaksi agama dan negara dalam sistem teokrasi modern, serta menunjukkan bahwa *Wilāyat al-Faqīh* mengalami adaptasi naratif dan operasional. Implikasi teoretisnya mendorong pengembangan pendekatan Islam politik yang lebih kontekstual dan inklusif. Arah penelitian selanjutnya disarankan untuk menyoroti resistensi warga melalui media digital, serta respons generasi muda terhadap sistem politik keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarialiabad, H., Rastegar, A., & Bastani, B. (2021). How sanctions have impacted iranian healthcare sector: a brief review. *Archives of Iranian Medicine*, 24(1), 58-63. <https://doi.org/10.34172/aim.2021.09>
- ALDosari, N. (2018). Between the supreme leader and the president: understanding wilayat al faqih (iranian) system of governance. *World Journal of Social Science Research*, 6(3), p389. <https://doi.org/10.22158/wjssr.v6n3p389>
- Alikarami, L. (2019). Iranian women. the quest for their legal equality since the constitutional revolution. *Tiempo Devorado*, 5(2), 138-155. <https://doi.org/10.5565/rev/tdevorado.154>
- Amrullah, A. (2022). Integration of islamic moderation values on islamic education learning material at madrasah aliyah level. *Ajis Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1), 27-44. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4284>

- Andani, S., Zulfah, Z., & Rizki, L. (2023). Validitas instrumen penelitian: pengaruh pendekatan ethno-rme terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik kelas vii di smpn 2 bangkinang kota. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 07-11. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.190>
- Anjariyah, R. and Usman, B. (2024). Pengaruh kinerja csr dan variabel makro ekonomi terhadap kinerja perusahaan. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 7(1), 403-418. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1435>
- Anwar, S. (2024). Islam dan demokrasi di iran. *Fikroh*, 8(2), 33-48. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v8i2.1681>
- Ansori, A. and Herlina, L. (2024). Pemikiran islam tentang keadilan dan pengawasan pemilu: menguatkan kesadaran politik pemilih pemula. *japi*, 4(2), 14-36. <https://doi.org/10.61624/japi.v4i2.147>
- Asadi-Pooya, A., Nazari, M., & Damabi, N. (2022). Effects of the international economic sanctions on access to medicine of the iranian people: a systematic review. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 47(12), 1945-1951. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13813>
- Bahri, Z. (2024). Pengaruh dinamis modal manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 21(2), 105-120. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v21i2.902>
- Basri, M. (2023). Gejala hijrah di indonesia: transformasi dari islamisme fundamentalis menuju islamisme populer. *Maarif*, 17(2), 31-51. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.193>
- Bernhardt, F. (2012). Firm conviction or forced belief? the islamic da'wah party's response to khomeini's theory of wilayat al-faqih. *International Journal of Contemporary Iraqi Studies*, 6(3), 299-314. https://doi.org/10.1386/ijcis.6.3.299_1
- Bisri, H. (2018). Khomeini's concept of wilāyat al-faqīh and its influence on the contemporary indonesian islamic thought. *Tajdid*, 25(1), 33. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v25i1.351>
- Caesara, A. and Yustisia, W. (2021). Karena faktor agama atau gaya berpikir? peran fundamentalisme agama dan need for closure dalam memprediksi toleransi politik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(3), 170-179. <https://doi.org/10.7454/jps.2021.20>
- Darmawan, R. (2024). Hakikat filsafat pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian muslim dan relevansinya dengan pendidikan islam kontemporer. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(01), 18-28. <https://doi.org/10.57008/jjp.v4i01.653>
- Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fiedler, R. (2023). Challenges in containment: assessing the ineffectiveness of us sanctions on iran's regional ambitions. *Barometr Regionalny Analizy I Prognozy*, 19(2), 135-144. <https://doi.org/10.56583/br.2302>
- Fitri, M., Junaidi, R., Amrullah, A., & Fakhruddin, F. (2024). Peran manusia menurut al-qur'an dan hadis: pemahaman dan implementasi dalam kehidupan modern. *ijmst*, 2(3), 18-23. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v2i3.310>
- Galstyan, S. (2024). Ավսարկ պայթնիլահ ռուհոլլահ խոմէյնիի «վելայաթ-ե ֆաղիհի» հայեցակարգի շուրջ / an overview of ayatollah ruhollah khomeini's concept of "velāyat-e faqīh". *Регион И Мир / Region and the World*, 9-13. <https://doi.org/10.58587/18292437-2024.3-9>

- Glazier, R. (2015). Bridging religion and politics: the impact of providential religious beliefs on political activity. *Politics and Religion*, 8(3), 458-487. <https://doi.org/10.1017/s1755048315000139>
- Golkar, S. (2012). Cultural engineering under authoritarian regimes: islamization of universities in postrevolutionary iran. *Digest of Middle East Studies*, 21(1), 1-23. <https://doi.org/10.1111/j.1949-3606.2012.00124.x>
- Hapsari, A., Setiawan, F., Urbaningkrum, S., Rahmawati, U., Afifah, M., & Rohmah, F. (2022). Analisis urgensi proses legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan di indonesia. *Sultra Educational Journal*, 2(2), 67-77. <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i2.247>
- Harianto, B. and Syalafiyah, N. (2022). Pemikiran politik imam khoemini. *ILJS*, 7(01), 1-13. <https://doi.org/10.53429/law.v7i01.498>
- Hasan, H., Azmi, N., & Yusoff, M. (2020). Islamic charities in australia and the governance predicaments. *Journal of Contemporary Issues and Thought*, 10, 1-9. <https://doi.org/10.37134/jcit.vol10.sp.1.2020>
- Hashmi, M. (2021). Theocratic autocracy in pakistan between 1977 to 1988 from the perspective of gramsci's theory of cultural hegemony. *Gomal University Journal of Research*, 37(01), 26-34. <https://doi.org/10.51380/gujr-37-01-03>
- Hejazi, J. and Emamgholipour, S. (2020). The effects of the re-imposition of us sanctions on food security in iran. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.207>
- Ibrahim, M., Islam, S., Zohriah, O., & Azid, M. (2024). Addressing contemporary ethical and moral issues through islamic education. *jois*, 1(1), 36-51. <https://doi.org/10.35335/kbbzar83>
- Imansyah, I. and Utama, I. (2023). The integration of islamic values in english classroom in integrated islamic school in mataram viewed from teaching instruments. *Seltics Journal Scope of English Language Teaching Literature and Linguistics*, 6(2), 167-174. <https://doi.org/10.46918/seltics.v6i2.2059>
- Islamy, A. (2023). Pengarustamaan moderasi beragama dalam penyelenggaraan majelis taklim di indonesia. *j.of religious policy*, 2(1), 103-132. <https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.17>
- Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh sumber informasi dan interaksi sosial di media sosial terhadap pembentukan opini politik masyarakat di indonesia. *SISH*, 1(01), 21-31. <https://doi.org/10.58812/sish.v1i01.303>
- Kara, S. (2020). The legal authority of the jurist and its scope in modern iran. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 1-27. <https://doi.org/10.37264/jcsi.v1i1.3>
- Koralage, K., Touseef, M., & Begam, A. (2022). The influence of religious beliefs on political participation. *ISSLP*, 1(2), 4-11. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.2>
- Manouchehri, B. and Burns, E. (2021). A "participatory school" in iran: a bottom-up learning approach in a top-down education system. *Education and Urban Society*, 55(3), 263-288. <https://doi.org/10.1177/00131245211048434>
- Muhammad, S. (2022). Konsep negara menurut imam ayatullah khomeini dalam tinjauan filsafat politik. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(3), 413-429. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13635>

- Mustopa, M. and Bisri, H. (2024). The struggle of law and power: how does imam khomeini's idea of wilayat al-faqih reconcile religion and state?. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 343-372. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.04>
- Muttaqien, M. (2020). Iran and covid-19: domestic preparedness and international sanctions. *Jurnal Global & Strategis*, 14(2), 451. <https://doi.org/10.20473/jgs.14.2.2020.451-465>
- Nurhaliza, N., Astuti, A., & Zulfah, Z. (2023). Validitas instrumen penelitian: pengaruh metode scaffolding terhadap kemampuan computational thinking peserta didik kelas viii di smp negeri 1 bangkinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 25-28. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.77>
- Oryoie, A. (2024). The impact of international sanctions on income mobility: evidence from iran. *Review of Development Economics*, 28(4), 1695-1717. <https://doi.org/10.1111/rode.13123>
- Papan-Matin, F. (2014). The constitution of the islamic republic of iran (1989 edition). *Iranian Studies*, 47(1), 159-200. <https://doi.org/10.1080/00210862.2013.825505>
- Prabaswari, P. (2021). Pengaruh budaya strategis pada kepemimpinan dan revolusi islam iran. *Jurnal Icmes*, 5(2), 186-208. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i2.107>
- Rahmawati, R. and Asasriwarni, A. (2024). Peradilan agama islam di negara syiah. *El-Faqih Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 1-18. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1195>
- Rais, M. (2018). Sejarah perkembangan islam di iran. *Tasamuh Jurnal Studi Islam*, 10(2), 273-288. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.73>
- Ramli, R., Sakti, I., Basri, S., Idamyanti, R., & Yusdarina, Y. (2024). Pengembangan bahan ajar fisika berbasis kearifan lokal pada peserta didik kelas x di sman 4 maros. *Karst Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapannya*, 7(1), 34-42. <https://doi.org/10.46918/karst.v7i1.2266>
- Robbi, I. (2022). Dampak covid-19 terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di jawa timur (studi kasus 38 kab / kota). *Cendekia Niaga*, 6(2), 101-109. <https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.689>
- Sadulloh, M. and Rahmi, D. (2024). Pengaruh inflasi human capital pengeluaran konsumsi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jawa barat tahun 2008 - 2022. *Bandung Conference Series Economics Studies*, 4(1), 229-236. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.11335>
- Sakhi, D., Amin, P., & Kurniati, K. (2024). Etika politik islam dalam masyarakat kontemporer: perspektif al-mawardi. *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 95-106. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>
- Sella, R. (2023). Analisis kepentingan amerika serikat dalam propaganda media massa terkait perkembangan nuklir iran masa pemerinatahan mahmoud ahmadinejad. *Jurnal Pir Power in International Relations*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.1>
- Setyawan, B., Anam, S., & Sood, M. (2022). Pengaruh kepemimpinan hassan rouhani terhadap transformasi arah kebijakan program nuklir iran. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijps)*, 4(2), 59-77. <https://doi.org/10.29303/ijps.v4i2.114>
- Setiawan, A. and Suhartini, A. (2024). The quran and restoration of education. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 2(02), 173-181. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i02.750>

- Siamdoust, N. (2023). Women reclaiming their voices for life and freedom: music and the 2022 uprising in iran. *Iranian Studies*, 56(3), 577-583. <https://doi.org/10.1017/irn.2023.15>
- Stausberg, M., Arab, P., & Maleki, A. (2023). Survey zoroastrians: online religious identification in the islamic republic of iran. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 62(4), 823-844. <https://doi.org/10.1111/jssr.12870>
- Sugiyarto, W. (2018). Kebijakan keagamaan terhadap kelompok minoritas di negara republik islam iran. *Harmoni*, 16(2), 272-290. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.9>
- Suhada, D., Natsir, N., & Haryanti, E. (2021). Epistemologi islam klasik dan kontemporer. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 948-957. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.360>
- Taefehshokr, N., Mertens, B., Beheshti, I., Zahedi, R., Łoś, M., Kindrachuk, J., ... & Ghavami, S. (2024). Populism versus public health: lessons from iran's covid-19 crisis and the global cost of scientific misinformation.. <https://doi.org/10.1101/2024.12.28.24319727>
- Tambaip, B. and Tjilen, A. (2023). Analisis kebijakan publik dalam derajat kesehatan di papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8232>
- Ulfa, R., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2024). Sistem peradilan islam di bawah wilayah al-faqih: kajian komparatif antara iran dan indonesia. *almaqasid*, 10(2), 319-346. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.14110>
- Utami, A., Anam, S., & Munir, A. (2022). Pengaruh pertentangan ideologi sunni-syi'ah terhadap hubungan bilateral arab saudi-iran di timur tengah. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijps)*, 4(1), 65-81. <https://doi.org/10.29303/ijps.v4i1.111>
- Wahab, G. (2019). Penanaman nilai-nilai karakter islam moderat pada anak usia dini di ra dwp iain palu. *Ana Bulava Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 17-40. <https://doi.org/10.24239/abulava.vol1.iss1.2>
- Walipah, W. and Naim, N. (2023). Pengaruh karakteristik wirausaha, inovasi produk terhadap keberhasilan usaha. *JEAMA*, 2(1), 43-48. <https://doi.org/10.55338/jeama.v2i1.61>
- Zafirovski, M. (2014). The protestant ethic and the spirit of democracy: what is the democratic effect of calvinism?. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 34(9/10), 634-653. <https://doi.org/10.1108/ijssp-05-2013-0055>